

## **Judi Online di Kamboja dan Indonesia: Kegagalan ASEAN Sebagai Institusi Regional**

Gabriele Florecita Darmawan<sup>1</sup>, Valerie Winata<sup>2</sup>, Muhammad Andara Firdaus<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,  
6092301075@student.unpar.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,  
6092301112@student.unpar.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,  
6092301282@student.unpar.ac.id

### **ABSTRAK**

Judi *online* yang tengah marak di negara-negara kawasan Asia Tenggara dapat mengancam stabilitas negara, baik dalam segi ekonomi maupun sosial, khususnya di Kamboja dan Indonesia. Judi *online* yang dijalankan di Kamboja merupakan bentuk kejahatan siber melalui janji palsu sebagai aksi penipuan dengan menggunakan perangkat digital atau internet, terbukti merugikan ekonomi masyarakat di Indonesia, sekaligus menjadi kejahatan transnasional diantara negara anggota ASEAN. Maraknya fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, namun tingginya prevalensi judi *online* di Indonesia-Kamboja dapat secara tidak langsung mencerminkan mekanisme Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) sebagai institusi regional. Meskipun terdapat berbagai upaya dan inisiasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi maraknya judi *online*, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan transnasional ini tetap berjalan secara lintas batas di Indonesia-Kamboja. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji bagaimana judi *online* yang merupakan kejahatan transnasional dapat terus berlangsung meskipun terdapat institusi seperti ASEAN sebagai wadah untuk pelaksanaan mekanisme kerja sama regional dengan menggunakan pendekatan institusionalisme. Melalui metode kualitatif, artikel ini menunjukkan kegagalan ASEAN sebagai institusi regional dalam menangani isu judi *online* yang terjadi di negara-negara anggotanya di kawasan Asia Tenggara, terkhususnya Indonesia dan Kamboja.

**Kata kunci:** Kejahatan Transnasional; Judi *Online*; Indonesia-Kamboja; ASEAN; Institusionalisme

### **ABSTRACT**

*Online gambling is rising in Southeast Asian countries and poses a threat to the stability of a nation, both economically and socially, especially in Cambodia and Indonesia. Online gambling, a form of cybercrime that involves empty promises which is prevalent in Cambodia, has negatively impacted Indonesia's economy and constructed a transnational threat to ASEAN countries. Certain factors cause the rise of this phenomenon, but the high prevalence of online gambling in Indonesia and Cambodia indirectly reflects the mechanization of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as a regional institution. Even though various efforts and initiatives that ASEAN member countries have made to overcome the rise of online gambling, it can't be denied that this transnational crime is ongoing between Indonesia and Cambodia. Therefore, this article aims to study how online gambling as a transnational crime can continue despite the presence of institutions such as ASEAN that aim to accommodate mechanisms such as regional cooperation with institutionalism as an approach. Through qualitative research methods, this article shows the failure of ASEAN as a regional institution to overcome the issue of online gambling in Southeast Asia, especially in Indonesia and Cambodia.*

**Keywords:** Transnational Crime; Online Gambling; Indonesia-Cambodia; ASEAN; Institutionalism

## Pendahuluan

Sepanjang sejarah eksistensinya, industri perjudian telah mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan.<sup>1</sup> Industri perjudian telah menghadapi masa-masa di mana aktivitas tersebut dianggap tidak bermoral hingga sampai pada masa di mana banyak orang yang menganggapnya sebagai hiburan semata, meskipun stigma negatif masih bertahan.<sup>2</sup> Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi pada tahun 1990 hingga awal 2000-an mendorong maraknya internet yang dimanfaatkan sebagai peluang untuk melahirkan industri judi *online*.<sup>3</sup> Kegiatan judi *online* merujuk pada kegiatan perjudian dengan menggunakan perangkat atau gawai yang terhubung dengan internet seperti *smartphone*, komputer, tablet, dan televisi interaktif.<sup>4</sup> Judi *online* juga mencakup individu atau badan yang terlibat dalam bisnis menerima, memasang, atau mengirimkan taruhan melalui internet, dan termasuk bisnis *online* seperti taruhan olahraga, poker *online* atau permainan untung-untungan lainnya.<sup>5</sup> Definisi tersebut selaras dengan aktivitas *cybercrime* yang merupakan aktivitas kriminal melalui komputer atau jaringan internet dengan untuk keuntungan kelompok atau pribadi.<sup>6</sup> Aktivitas judi *online* memiliki potensi untuk mengundang dan menjadi sarang tindakan kriminal lainnya karena menggunakan platform yang dapat mengakses data pribadi pengguna dan memproses transaksi yang cukup besar di dalamnya.<sup>7</sup> Tak hanya itu, industri judi *online* juga melibatkan tindakan-tindakan ilegal lainnya seperti pencurian uang, pencurian informasi pribadi, pelanggaran data, *ransomware*, hingga gangguan sistem yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas finansial pengguna.<sup>8</sup>

Praktik serupa bukanlah suatu hal yang asing di kawasan Asia Tenggara, bahkan dalam beberapa budaya kuno, aktivitas tersebut seringkali melibatkan anggota keluarga.<sup>9</sup> Dua negara kawasan Asia Tenggara yang dapat dilihat sebagai contoh studi kasus maraknya judi *online* ialah Kamboja dan Indonesia. Tren judi *online* di Kamboja berkembang dengan sangat pesat pada sekitar tahun 2016 hingga 2019, terkhususnya di kota Sihanoukville yang menjadi pusat dari industri tersebut. Tak hanya itu, semenjak industri ilegal ini beredar dengan sangat pesat, penipuan *online* maupun secara nyata, perdagangan manusia, pemerasan uang, dan banyak tindakan kriminal lainnya yang menjadi semakin merajalela hingga mendapatkan peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat kriminalitas paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.<sup>10</sup> Berkat maraknya operasi ilegal tersebut, Kamboja kerap dikenal

---

<sup>1</sup> Laura Woods Fidelie, "Internet Gambling: Innocent Activity or Cybercrime?," *International Journal of Cyber Criminology* 3, no. 1 (January 1, 2009): 476.

<sup>2</sup> Jeffrey L. Derevensky, Rina Gupta, and Maggie Magoon, "Adolescent Problem Gambling: Legislative and Policy Decisions," *Gaming Law Review* 8, no. 2 (April 2004): 107–17, <https://doi.org/10.1089/109218804774076385>.

<sup>3</sup> Laura Woods Fidelie, "Internet Gambling: Innocent Activity or Cybercrime?," *International Journal of Cyber Criminology* 3, no. 1 (January 1, 2009): 476.

<sup>4</sup> Gainsbury, S., Wood, R., Russell, A., Hing, N., & Blaszczynski, A. (2012). A digital revolution: Comparison of demographic profiles, attitudes and gambling behavior of internet and non-internet gamblers. *Computers in Human Behavior*, 28, 1388–1398.

<sup>5</sup> "Online Gambling Definition," Law Insider, n.d., <https://www.lawinsider.com/dictionary/online-gambling>.

<sup>6</sup> "Tips on How to Protect Yourself against Cybercrime," [www.kaspersky.com](https://www.kaspersky.com), December 5, 2019, <https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-cybercrime>.

<sup>7</sup> Editor, "The Risks of Cybercrime for the Online Gambling Industry," *Casino Inside - The gambling industry magazine!*, September 4, 2024, <https://www.casinoinside.ro/en/the-risks-of-cybercrime-for-the-online-gambling-industry/>.

<sup>8</sup> "The Murky Illusion: Online Gambling and Cyber-Security Issues," [www.cyberpeace.org](https://www.cyberpeace.org), n.d., <https://www.cyberpeace.org/resources/blogs/the-murky-illusion-online-gambling-and-cyber-security-issues>.

<sup>9</sup> Risma Afrinda Parandita. (2023), Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat, *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 22–28, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>.

<sup>10</sup> Ibid.

sebagai tuan rumah dari perjudian *online* atau pusat dari kriminalitas. Hal tersebut berdampak langsung pada stabilitas ekonomi di Kamboja, terlihat dari penurunan jumlah wisatawan internasional, mengingat pariwisata merupakan salah satu pilar ekonomi negara tersebut.<sup>11</sup>

Pada 2019, jumlah wisatawan mencapai 6,6 juta, namun kini hanya 5,3 juta.<sup>12</sup> Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan ini, seperti COVID-19, namun stigma negatif yang telah melekat pada Kamboja turut andil dalam penurunan ini.<sup>13</sup> Perekonomian domestik Kamboja juga tak turut membaik dengan adanya investasi dari Tiongkok yang turut memperjelas kesenjangan ekonomi dengan terjadinya perampasan tanah lokal guna membangun infrastruktur pelaksanaan operasi ilegal ini serta berperan dalam mendanai industri judi *online*. Dalam hal ini, pekerja lokal non-elit di Kamboja sama sekali tidak merasakan keuntungan dari operasi judi *online* yang dilakukan secara ilegal dan bahkan tingkat pengangguran terus meningkat.<sup>14</sup> Di sisi lain, meskipun pemerintah Kamboja telah diketahui menetapkan larangan perjudian *online*, penetapan hukum masih menjadi sebuah tantangan, mengingat situs-situs ilegal yang menjadi akses untuk judi *online* masih beredar di masyarakat.<sup>15</sup> Menjadikan Kamboja sebagai salah satu pusat sektor industri judi *online* dinilai cukup menguntungkan, dilihat dengan tarif pajak serta biaya hidup yang relatif cukup murah.<sup>16</sup>

Pada bulan Agustus 2023, *Office of the UN High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) melaporkan setidaknya ratusan ribu orang diperdagangkan untuk melakukan kejahatan *online* di seluruh Asia Tenggara dengan jumlah 120.000 orang di Myanmar dan 100.000 lainnya di Kamboja dipaksa untuk melakukan penipuan, seperti penipuan investasi, penipuan kripto, hingga perjudian ilegal. Meskipun Kamboja telah mengeluarkan larangan judi *online* secara formal di tahun 2019, industri tersebut masih beroperasi secara ilegal. Penggerebekan dan pengusiran “investor” perjudian dan penipuan *online* asal Tiongkok oleh pemerintah Kamboja pada September 2022 hanya mendorong perusahaan judi *online* untuk berpindah lokasi, sehingga mereka menargetkan Indonesia. Perusahaan ilegal ini merekrut pemuda Indonesia melalui platform media sosial atau perekrut yang dikenal (tetangga, teman, bahkan anggota keluarga) dengan janji kesempatan untuk kerja di luar negeri dengan persyaratannya minim, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal tersebut mempengaruhi maraknya aktivitas judi *online* di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>17</sup>

Praktik dan pengawasan judi di Indonesia diawali dari masa penjajahan Belanda, di mana perjudian dianggap melanggar hukum jika tidak ada izin pihak berwenang sehingga mayoritas kriminalitas yang terjadi berasal dari perjudian. Pada tahun 1974, sebagai upaya mengatur perjudian,

---

<sup>11</sup> Pengly Horng, “The Fall-Outs of Online Gambling in Cambodia - Khmer Times,” Khmer Times - Insight into Cambodia, October 14, 2024, <https://www.khmertimeskh.com/501573780/the-fall-outs-of-online-gambling-in-cambodia/>.

<sup>12</sup> “Ministry of Tourism, Cambodia - Official Website - Holidays,” [tourismcambodia.org](https://tourismcambodia.org/official-activities/foreign-tourist-arrivals-increase-140-percent-in-2023), n.d., <https://tourismcambodia.org/official-activities/foreign-tourist-arrivals-increase-140-percent-in-2023>.

<sup>13</sup> Pengly Horng, “The Fall-Outs of Online Gambling in Cambodia - Khmer Times,” Khmer Times - Insight into Cambodia, October 14, 2024, <https://www.khmertimeskh.com/501573780/the-fall-outs-of-online-gambling-in-cambodia/>.

<sup>14</sup> Amelie De Leon, “Cutting Losses: Southeast Asia’s Crackdown on Online Gambling | New Perspectives on Asia | CSIS,” [Csis.org](https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling), 2024, <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling>.

<sup>15</sup> AsiaGamingBrief, “Cambodia Grapples with Illegal Online Gambling Boom | AGB,” Asia Gaming News | AGB - Asia Gaming Brief, July 7, 2024, <https://agbbrief.com/news/cambodia/08/07/2024/cambodia-grapples-with-illegal-online-gambling-boom/>.

<sup>16</sup> Amelie De Leon, “Cutting Losses: Southeast Asia’s Crackdown on Online Gambling | New Perspectives on Asia | CSIS,” [Csis.org](https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling), 2024, <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling>.

<sup>17</sup> “‘Armed Men and Sniffer Dogs’: Indonesian Forced to Work in Cambodian Online Gambling Ring Recalls Horror Ordeal,” CNA, 2025, <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-cambodia-human-trafficking-online-crimes-syndicates-gambling-4849926>.

pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1974, namun dianggap tidak legal akibat pernyataan yang mengharuskan izin untuk penyelenggaraan perjudian, di mana hal tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila.<sup>18</sup> Judi *online* yang terjadi di Indonesia sekarang didorong oleh mudahnya mengakses jaringan internet dan pemaparan terhadap iklan-iklan judi *online* di media sosial yang disamar sebagai aplikasi *game*, serta menjanjikan uang dengan banyak dan cepat. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023.<sup>19</sup> Dari sekian banyak pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023, ditemukan bahwa sebanyak 168 juta transaksi judi *online* dan transaksi perjudian online di Indonesia mencapai Rp307 triliun.<sup>20</sup> Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Indonesia untuk terjebak dalam judi *online* termasuk faktor ekonomi di mana masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin dan ingin mendapatkan banyak uang secara cepat, serta kurangnya literasi finansial yang membuat masyarakat ini tidak dapat memperhitungkan dan mempersiapkan tindakan represif dari kerugian finansial kekalahan mereka.<sup>21</sup>

Praktik judi *online* ditentang oleh banyak institusi, salah satunya ASEAN sebagai institusi regional, namun judi *online* masih terus berlanjut. ASEAN sebagai institusi yang memiliki prinsip *non-intervention* berdampak pada kurangnya penegasan sebuah regulasi dan koordinasi bersama untuk mengatasi masalah judi *online* karena masing-masing negara memiliki regulasi dan cara berbeda dalam menanggulangi masalah judi *online*. Selain itu, prinsip non-intervensi ASEAN sangat membatasi kemampuannya sebagai institusi regional untuk campur tangan secara langsung dalam masalah negara anggotanya yang menghambat tindakan secara kolektif.<sup>22</sup> Maka dari itu, tim penulis ingin menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana judi *online* yang merupakan kejahatan transnasional dapat terus berlangsung meskipun terdapat institusi seperti ASEAN sebagai wadah untuk pelaksanaan mekanisme kerja sama regional?” karena tim penulis merasa gagalnya institusi seperti ASEAN yang seharusnya berperan sebagai wadah berdampak buruk terhadap penyelesaian kejahatan transnasional seperti judi *online*.

## Kajian Literatur

Bagian ini akan menyajikan kajian literatur yang menjadi dasar penelitian. Terdapat beberapa studi yang membahas terkait ASEAN sebagai sebuah wadah untuk menyelesaikan masalah. Dalam beberapa literatur yang dikaji, terdapat perbedaan pendapat mengenai ASEAN, di mana satu sisi menyatakan ASEAN tidak berguna/efektif dalam peran institusinya untuk menyelesaikan permasalahan, sedangkan sisi lainnya mengatakan bahwa ASEAN telah efektif dan berhasil menciptakan menyelesaikan permasalahan.

---

<sup>18</sup> Risma Afrinda Parandita. (2023), Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat, *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 22–28, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/63>.

<sup>19</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang,” [apjii.or.id](https://apjii.or.id), February 7, 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

<sup>20</sup> Indonesia Pati, “Stop Online Gambling - News,” [Bps.go.id](https://bps.go.id) (BPS-Statistics Indonesia Pati Regency, 2024), <https://patikab.bps.go.id/en/news/2024/10/18/841/stop-online-gambling.html>.

<sup>21</sup> “Online Gambling Crisis in Indonesia: Understanding Causes and Implementing Solutions,” [jalin.co.id](https://www.jalin.co.id), 2024, <https://www.jalin.co.id/en-id/news/blog/online-gambling-crisis-in-indonesia-understanding-causes-and-implementing-solutions>.

<sup>22</sup> Amelie De Leon, “Cutting Losses: Southeast Asia’s Crackdown on Online Gambling | New Perspectives on Asia | CSIS,” [Csis.org](https://www.csis.org), July 25, 2024, <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling>.

Di satu sisi, dinyatakan bahwa ASEAN tidak berguna/efektif dalam peran institusinya untuk menyelesaikan permasalahan. Menurut sebuah penelitian yang dituliskan oleh Iqbal Ramadhan yang berjudul “*ASEAN Consensus and Forming Cybersecurity Regulation in Southeast Asia*”, ditemukan bahwa ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang pesat namun belum memiliki kerangka kerja untuk memerangi ancaman *cybercrime* dan hanya mampu mengeluarkan “*ASEAN Leaders Issue Statement on Cybersecurity Cooperation*”. Tantangan yang dihadapi ASEAN untuk membuat kerangka kerja yang stabil berupa mencapai konsensus *cybersecurity*, mengingat bahwa mekanisme pengambilan kebijakan ASEAN berpedoman pada prinsip non-intervensi, serta terdapat tantangan berupa kesenjangan teknologi.<sup>23</sup>

Sejalan dengan literatur pertama, pendapat Monica Nila Sari pada artikel berjudul “*Cybercrime in Association of Southeast Asian Nations: Regional Effort and Its Effectiveness*” mengatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional tidak efektif dalam menghadapi kasus kejahatan siber. Hal tersebut didasari atas kegagalan implementasi *ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime* akibat tantangan utama yang dihadapi, yaitu proses pengambilan keputusan, keragaman sistem hukum dan bahasa, kesenjangan kematangan siber, yurisdiksi, serta kesulitan dalam memperoleh bukti elektronik (*e-evidence*).<sup>24</sup>

Hal tersebut turut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdurrohman yang menemukan bahwa meskipun ASEAN telah memiliki rencana digital utama untuk membangun kerja sama dan konektivitas antar negara di kawasan Asia Tenggara guna membangun keamanan siber, terdapat kontradiksi dari negara-negara anggota yang bertentangan dengan rencana itu sendiri. Dilema serta rasa ketidakamanan dari negara-negara anggota didasarkan oleh ketidakpastian akan kepentingan satu sama lain sehingga menghasilkan kebijakan yang saling bertentangan. Kontradiksi antara ASEAN sebagai institusi regional dan negara-negara anggotanya cukup menghambat tercapainya konektivitas tersebut.<sup>25</sup>

Selanjutnya, di sisi lain, terdapat pengelompok literatur yang berpendapat bahwa ASEAN telah berhasil sebagai institusi regional untuk menyelesaikan permasalahan. Sebuah tulisan oleh Robert Brian Smith yang berjudul “*Cybercrime in ASEAN: Anti-Child Pornography Legislation*” menemukan bahwa ASEAN berhasil dalam mengambil tindakan secara organisasi regional dan negara anggota sebagai individu, di mana ASEAN menyelaraskan undang-undang *cybercrime* di sepuluh negara ASEAN untuk menentukan hukuman pelanggaran pornografi anak. Ditemukan juga meskipun masing-masing negara anggota ASEAN telah mengembangkan undang-undangnya sendiri, harmonisasi undang-undang mereka dapat memperkuat dampaknya.<sup>26</sup>

Mendukung literatur sebelumnya, Pushpanathan Sundram dalam artikel berjudul “*ASEAN cooperation to combat transnational crime: progress, perils, and prospects*” menemukan bahwa ASEAN telah berhasil melakukan pencegahan serta tindak lanjut mengenai kasus kejahatan lintas batas.

---

<sup>23</sup> Iqbal Ramadhan, “ASEAN Consensus and Forming Cybersecurity Regulation in Southeast Asia,” *Proceedings of the 1st International Conference on Contemporary Risk Studies, ICONIC-RS 2022, 31 March-1 April 2022, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*, 2022, <https://doi.org/10.4108/eai.31-3-2022.2320684>.

<sup>24</sup> Monica Nila Sari, “Cybercrime in Association of Southeast Asian Nations: Regional Effort and Its Effectiveness,” *Journal of Information Policy* (2024), <https://doi.org/10.5325/jinfolpoli.14.2024.0016>.

<sup>25</sup> Muhammad Abdurrohman, “ASEAN Digital Masterplan: Responding Cyber Security Dilemma in the Post-Covid Era,” *Global Focus* 2, no. 1 (April 30, 2022): 17–26, <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2022.002.01.2>.

<sup>26</sup> Robert Brian Smith, “Cybercrime in ASEAN: Anti-Child Pornography Legislation,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 2 (November 1, 2020): 277–94, <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.37931>.

Pada artikel ini diperlihatkan bukti berupa Operation Maharlika III terkait perdagangan manusia dan Operation HAECHI-I yang menargetkan kejahatan siber. Pada tindakan-tindakan tersebut ASEAN berperan dalam dalam menciptakan kooperasi regional berupa adopsi dokumen strategis, operasi bersama, dan inisiatif pembangunan kapasitas.<sup>27</sup>

Argumen tersebut didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Indah Novitasari pada artikelnya yang berjudul “ Babak Baru Rezim Keamanan Siber di Asia Tenggara Menyongsong ASEAN Connectivity 2025” yang menunjukkan bahwa sejauh ini ASEAN sebagai institusi regional telah mengupayakan kerangka kerja terkait dengan keamanan siber dengan menciptakan kerangka regulasi yang tetap mendorong terjalinnya kerja sama antar negara Asia Tenggara serta terus mendorong prinsip *win-win solution* yang tetap memerhatikan kepentingan semua negara anggota ASEAN. Tak hanya itu, artikel ini juga memperlihatkan bahwa dengan adanya Komunitas ASEAN 2015, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat saling terdorong untuk membangun kerja sama dan konektivitas dalam bidang keamanan siber melalui teknologi informasi dan komunikasi.<sup>28</sup>

Literatur-literatur yang digunakan membuktikan akan adanya perdebatan akademik terkait dengan peran serta kegagalan ASEAN dalam membangun keterikatan antar negara anggotanya untuk menghadapi aksi kriminalitas siber tingkat internasional. Secara garis besar, terdapat dua pandangan mengenai keberhasilan ASEAN dalam menangani kejahatan siber. Di satu sisi, beberapa kelompok peneliti menilai bahwa ASEAN tidak berhasil dalam menciptakan kerangka kerja dan regulasi yang diimplementasikan oleh seluruh negara-negara anggotanya untuk menghadapi kejahatan siber. Namun, di sisi lain, beberapa peneliti juga melihat keberhasilan ASEAN dalam mengambil tindakan dan langkah-langkah inisiatif untuk memerangi kriminalitas ini, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Literatur-literatur di atas memberikan pemahaman mendalam terkait peran ASEAN sebagai institusi dalam menghadapi *cybercrime*. Artikel ini didasarkan dengan persetujuan akan posisi literatur bahwa ASEAN tidak berguna/efektif dalam peran institusinya untuk menyelesaikan permasalahan.

Merujuk pada literatur-literatur yang telah membahas terkait efektivitas ASEAN sebagai sebuah institusi untuk menyelesaikan masalah, terdapat perdebatan pandangan akademik mengenai hal tersebut. Artikel ini mengambil posisi yang setuju pada pandangan bahwa ASEAN belum mampu secara efektif memainkan perannya dalam menangani suatu isu yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Pandangan tersebut dinilai lebih meyakinkan melihat dari berbagai studi yang dapat secara eksplisit menjelaskan hambatan-hambatan besar bagi ASEAN untuk mengimplementasikan keputusan atau kebijakan secara kolektif. Hal tersebut lebih meyakinkan dibandingkan dengan pandangan yang menjelaskan keberhasilan ASEAN dalam menghadapi suatu isu sebagai institusi regional dengan menyoroti contoh-contoh yang lebih kecil dan cenderung simbolis sehingga belum dapat persoalan utama.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif untuk menganalisis studi kasus. Metode ini mengutamakan deskripsi interpretatif dan naratif melalui analisis data non-

---

<sup>27</sup> Sundram, Pushpanathan. "ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crime: Progress, Perils, and Prospects." *Frontiers in Political Science* 6 (2024). <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>.

<sup>28</sup> Indah Novitasari, “BABAK BARU REJIM KEAMANAN SIBER DI ASIA TENGGARA MENYONGSONG ASEAN CONNECTIVITY 2025,” *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 2 (January 28, 2018): 220, <https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.624>.

numerik, seperti literatur, gambar, atau objek, yang disusun secara logis.<sup>29</sup> Konteks kejadian, termasuk aspek waktu, ruang, emosi, dan sosio-kultural, menjadi elemen penting dalam proses analisis. Desain penelitian eksplanatif yang berfokus pada hubungan sebab-akibat antar faktor dinilai tepat untuk mengeksplorasi dan memahami kegagalan ASEAN sebagai institusi yang menaungi kerjasama negara anggota khususnya dalam kasus judi *online* antara Kamboja dan Indonesia.

### **Teori Liberal Institutionalisme**

Institusionalisme menjelaskan peran institusi internasional dalam mengelola hubungan antarnegara. John Ikenberry (2001) dalam pandangannya mengenai institusionalisme neoliberal berargumen bahwa institusi internasional dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan transparansi dalam hubungan antarnegara. Oleh karena itu, institusi tersebut memainkan peran penting dalam menyusun aturan yang mengatur hubungan internasional, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong negara-negara untuk bekerja sama. Sebagai contoh, institusi-institusi ini seperti ASEAN, PBB, atau WTO menjadi wadah untuk mengatur dan mengelola hubungan antarnegara yang saling bergantung, serta menciptakan ruang bagi negosiasi dan pencapaian kesepakatan bersama.<sup>30</sup> Dengan demikian, institusi-institusi ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian internasional, sekaligus memastikan bahwa negara-negara yang terlibat dalam hubungan interdependen dapat memperoleh manfaat dari kerja sama mereka.

Menurut Ikenberry, institusi berfungsi sebagai mekanisme *binding* yang “mengunci” (*lock-in*) aturan main, sehingga setiap anggota yang terikat akan dihalangi untuk melakukan perubahan sepihak oleh tingginya biaya politik dan ekonomis yang harus ditanggung.<sup>31</sup> Dengan demikian, keberadaan lembaga internasional semacam Bretton Woods atau PBB memastikan stabilitas dan kepastian jangka panjang, karena negara-negara anggota memahami bahwa komitmen bersama sulit diubah tanpa persetujuan bersama. Prinsip *lock-in* ini secara kausal menciptakan ikatan institusional yang memperkuat kredibilitas komitmen. Dengan kata lain, kondisi *lock-in* menimbulkan efek domino perubahan sepihak menjadi mahal, keputusan kolektif lebih diutamakan, dan kepercayaan antarpemerintah meningkat.

Selain aspek pengikatan diri, institusi memegang peranan penting dalam mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian dalam kerjasama internasional.<sup>32</sup> Melalui prosedur bersama, forum multilateral, dan mekanisme penyelesaian sengketa, lembaga-lembaga ini menurunkan kebutuhan negosiasi ulang dan meminimalkan peluang oportunisme. Sebagai akibatnya, masing-masing negara dapat mengalokasikan sumber daya penegakan hukum atau diplomasi ke ranah substantif seperti pemberantasan kejahatan lintas batas daripada terjebak dalam proses koordinasi yang memakan waktu dan biaya tinggi. Keterkaitan institusional ini juga meningkatkan transparansi, di mana aturan yang jelas serta saluran pertukaran informasi resmi memungkinkan anggota memonitor pelaksanaan kebijakan mitra kerja sama dengan lebih efisien.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, (California: SAGE, 2018), 17.

<sup>30</sup> Ikenberry, G. J. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

<sup>31</sup> Ibid., 197–206.

<sup>32</sup> Ibid., 61–14.

<sup>33</sup> Ibid.,

Dengan alur intelijen dan data yang terstandarisasi, potensi kesalahan persepsi atau interpretasi yang biasa memicu ketidakpercayaan dan kebuntuan negosiasi dapat diminimalisir. Dalam praktiknya, lembaga multilateral menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk saling menegur atau memperbaiki kebijakan tanpa harus merusak reputasi diplomatik. Oleh karena itu, teori institusionalisme liberal Ikenberry menekankan bahwa tanpa institusi yang kredibel dan kuat, biaya koordinasi akan tetap tinggi dan transparansi sulit dicapai, sehingga kerjasama internasional rentan mengalami kegagalan.

## Analisis

### a. Kegagalan Peran Wadah oleh ASEAN

ASEAN menghadapi kesulitan serius dalam menangani kejahatan lintas batas judi *online* antara Indonesia dan Kamboja. Kasus ini meningkat tajam pada 2020–2023 (kasus terdeteksi naik dari 15 menjadi 1.386), mencerminkan lemahnya koordinasi keamanan kedua negara dan seharusnya menjadi perhatian ASEAN.<sup>34</sup> Namun, menurut teori institusionalisme liberal, sebuah institusi efektif harus mampu membangun mekanisme penguncian (*institutional lock-in*) yang mengikat komitmen anggota jangka panjang.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, ASEAN belum berhasil menciptakan kondisi penguncian tersebut. Hal ini terlihat dari ketiadaan kerangka aturan bersama yang mengikat dan koordinasi formal yang lemah dalam isu perjudian lintas batas.

Kemunculan judi *online* menjadi permasalahan baru di kawasan Asia Tenggara menjadikan sebagai isu yang diangkat oleh ASEAN sebagai permasalahan serta kejahatan lintas batas. Judi online di Asia Tenggara membawa dampak ekonomi, sosial, dan keamanan yang signifikan, sehingga memerlukan regulasi ketat dan kerja sama lintas negara untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan.<sup>36</sup> Dikutip melalui Statista, nilai keuntungan pasar judi *online* pada 2024 mencapai 1.22 miliar USD dan diperkirakan mengalami peningkatan nilai mencapai 1.57 miliar USD pada 2029.<sup>37</sup> Meskipun telah menjadi permasalahan regional, ASEAN sendiri belum mengeluarkan kerangka kerja yang konkret. ASEAN sempat mengeluarkan *joint statement* dengan Tiongkok di Laos pada 10 Oktober 2024. Pada *joint statement* tersebut kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum guna memerangi kejahatan telekomunikasi dan judi online, yang telah menjadi ancaman regional dengan dampak luas seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan ketidakstabilan sosial. Melalui pusat anti-penipuan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta koordinasi lintas batas, kedua pihak berkomitmen untuk mengatasi aliran dana ilegal dan meningkatkan kesadaran publik dalam menghadapi kejahatan ini.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Ikenberry, G. J. *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*. Princeton: Princeton University Press, 2001, 197–206.

<sup>35</sup> Darmawan, Rifki. "Indonesia–Cambodia Partnership to Counter Online Gambling." *Modern Diplomacy*, August 12, 2024, <https://modern diplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling/>.

<sup>36</sup> Leon. Amelie De, "Cutting Losses: Southeast Asia's Crackdown on Online Gambling," *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, July 25, 2024, <https://www.csis.org/blogs/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling>.

<sup>37</sup> Statista, "Online Gambling - Southeast Asia," *Market Insights: Advertising & Media*, <https://www.statista.com/outlook/amo/online-gambling/southeast-asia>.

<sup>38</sup> Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *ASEAN-China Joint Statement on Combating Telecommunication Network Fraud and Online Gambling*, October 10, 2024, <https://asean.org/asean-china-joint-statement-on-combating-telecommunication-network-fraud-and-online-gambling/>.



*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) merupakan pegangan cara kerja sama negara anggota. Di mana TAC menetapkan penghormatan terhadap kedaulatan, tidak campur tangan dalam urusan domestik negara anggota (*Non-Intervention*), penyelesaian sengketa secara damai, dan kerja sama untuk kepentingan bersama.<sup>39</sup> Dilandaskan dengan prinsip tersebut ASEAN sebagai organisasi regional bertugas sebagai wadah kerja sama negara anggota untuk menjaga kestabilan regional. Pada konteks kejahatan lintas batas berbentuk kejahatan siber, ASEAN juga bertindak sebagai untuk menyusun kebijakan bersama dan melakukan operasi gabungan dalam menghadapi tantangan transnasional. Pengadopsian dokumen-dokumen strategis seperti *ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime*. Dalam hal ini, ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antar anggota dalam menghadapi ancaman tersebut. Deklarasi ini mencangkup langkah-langkah penting, seperti pengakuan terhadap pentingnya harmonisasi undang-undang terkait kejahatan siber dan bukti elektronik, serta mendorong negara anggota untuk mengeksplorasi kemungkinan bergabung dengan instrumen regional dan internasional yang ada.<sup>40</sup> Meskipun terdapat beberapa usaha pemberantasan, prinsip TAC yaitu *Non-Intervention* menghambat terciptanya kerangka kerja yang konkret dan mengikat.

Tidak adanya kerangka konkret yang mengikat memunculkan permasalahan ambiguitas posisi negara anggota pada kejahatan siber. Dalam hal ini, ASEAN menghadapi berbagai hambatan dalam tata kelola dunia maya yang diakibatkan oleh tantangan struktural, kurangnya pemahaman hukum yang seragam, mekanisme penegakan hukum, dan kerja sama yang efektif. Tidak seperti Uni Eropa, ASEAN tidak memiliki integrasi hukum yang mendalam atau kesamaan budaya, bahasa, serta masalah ekonomi dan keamanan, sehingga kerja sama lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dan geografis.<sup>41</sup> Implementasi norma-norma dunia maya di ASEAN cenderung bervariasi, dengan beberapa negara seperti Singapura dan Vietnam memiliki fokus yang berbeda dalam undang-undang keamanan siber.<sup>42</sup> Rotasi kepemimpinan ASEAN seringkali memengaruhi kesinambungan dalam memprioritaskan tata kelola dunia maya, seperti yang terlihat dari perbedaan fokus tiap negara saat menjabat sebagai ketua. Sebagai contoh, sebagian besar negara anggota ASEAN belum meratifikasi Konvensi Budapest tentang Kejahatan Dunia Maya, meskipun banyak undang-undang domestik mereka telah sejalan dengan prinsip-prinsip konvensi tersebut.<sup>43</sup> Selain itu, perbedaan politik, ekonomi, budaya, dan sosial antarnegara anggota menghambat pembentukan kepercayaan yang diperlukan untuk integrasi regional yang lebih kuat, sehingga memperlambat pengembangan standar dan nilai bersama dalam tata kelola dunia maya.

Kelemahan ASEAN sebagai institusi terlihat dari belum memiliki kerangka kerja spesifik dalam penanganan kejahatan lintas batas serta belum adanya norma kolektif pada negara anggota menghambat terciptanya *lock-in* negara-negara anggota terutama dalam kasus judi *online*. Gagalnya *lock-in* pada negara-negara ASEAN terlihat dari ambiguitas posisi negara anggota pada konteks judi

---

<sup>39</sup> Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, February 24, 1976, <https://asean.org/asean-declaration-to-prevent-and-combat-cybercrime/>.

<sup>40</sup> Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime*, November 14, 2017, <https://asean.org/asean-declaration-to-prevent-and-combat-cybercrime/>.

<sup>41</sup> P. Murray, "Comparative Regional Integration in the EU and East Asia: Moving Beyond Integration Snobbery," *International Politics* 47, no. 3/4 (2010): 308–323, <http://dx.doi.org/10.1057/ip.2010.13>.

<sup>42</sup> EG Tan, Eugene, and Benjamin Ang. "ASEAN Ambiguity on International Law and Norms for Cyberspace", *Baltic Yearbook of International Law Online* 20, 1 (2022): 133-162, doi: [https://doi.org/10.1163/22115897\\_02001\\_008](https://doi.org/10.1163/22115897_02001_008)

<sup>43</sup> Y. Chang, "Cybercrime and Cyber Security in ASEAN," in *Comparative Criminology in Asia*, ed. J. Liu, M. Travers, and L. Y. C. Chang, Springer Series on Asian Criminology and Criminal Justice Research (Singapore: Springer, 2017), 135–148.

*online*. Prinsip ini dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan serta proses pengambilan keputusan kolektif.

#### **b. Perspektif Kamboja**

Kemudian, jika melihat dari perspektif Kamboja, aksesibilitas perjudian *online* di Kamboja memengaruhi peningkatan jumlah penjudi di negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Indonesia. Pasalnya, Kamboja merupakan salah satu negara yang melegalkan industri perjudian baik secara daring maupun nyata, memudahkan masyarakat asing dari berbagai negara yang terhalang aturan domestik untuk mengakses situs perjudian yang berpusat di Kamboja. Mudahnya aksesibilitas akan situs judi *online* yang dioperasikan di Kamboja menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah warga Indonesia yang terlibat dalam platform tersebut, meskipun Indonesia sendiri telah memiliki larangan hukum akan perjudian. Tercatat bahwa setidaknya jumlah transaksi judi *online* di Indonesia mencapai angka Rp350 triliun, dengan server yang terdeteksi berlokasi di Kamboja.<sup>44</sup> Sebanyak 72.000 warga Indonesia yang menetap di Kamboja pun tidak memiliki izin dan telah diklaim oleh aparat setempat atas keterlibatannya dalam industri ini.<sup>45</sup> Data yang telah disebutkan membuktikan bahwa kebijakan Kamboja akan industri judi *online* yang tidak terlalu mengikat dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial domestik Indonesia.

Hal tersebut dapat terjadi karena meskipun kebijakan Kamboja yang lemah atau bahkan membebaskan industri perjudian *online* cenderung merugikan pihak Indonesia, pemerintah Kamboja dapat melihat potensi keuntungan ekonomi dalam perjudian *online* sehingga regulasi diatur untuk mendukung pelaksanaannya yang sah dan mendukung perindustrian ini.<sup>46</sup> Selain itu, Kamboja juga telah memiliki undang-undang yang diusung pada tahun yang mengatur tentang larangan akan berjudi. Akan tetapi, aturan tersebut tampaknya memang tak selalu ditegakkan.<sup>47</sup> Namun, dengan berkembangnya industri perjudian *online*, semakin banyak tindakan kriminal yang terkait dengan industri ini muncul. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga negara asing yang terlibat, tetapi juga memengaruhi warga Kamboja sendiri. Tingkat kriminalitas yang meningkat menjadi tanda peringatan bagi pemerintah Kamboja akan dampak negatif dari lemahnya hukum yang mengikat dan kerja sama antar kedua negara atas tindakan pencegahan dan koordinasi.

Pada tahun 2019, pemerintah Kamboja akhirnya secara resmi menetapkan larangan judi *online* sebagai tindakan reaktif atas maraknya tindakan kriminal yang disebabkan oleh industri ini. Kendati demikian, keefektifan penerapannya masih terus perlu dibuktikan, mengingat Undang-Undang tahun 1996 yang melarang perjudian pun belum ditegakkan secara optimal.<sup>48</sup> Kesulitan untuk menegakkan hukum atas aktivitas ilegal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, operator yang menggunakan

---

<sup>44</sup> “Kominfo: Servers of Online Gambling in Indonesia Based in the Philippines and Cambodia - OBSERVER - the Latest Information about Indonesian News and Social Culture,” OBSERVER - the latest information about Indonesian news and social culture, October 20, 2023, <https://observerid.com/kominfo-servers-of-online-gambling-in-indonesia-based-in-the-philippines-and-cambodia/>.

<sup>45</sup> Kuch Sikol, “Cambodia’s Illegal Online Gambling Sector Employs Thousands of Indonesians,” Kiripost.com, October 11, 2024, <https://kiripost.com/stories/cambodias-illegal-online-gambling-sector-employs-thousands-of-indonesians>.

<sup>46</sup> “Online Casinos - Southeast Asia | Statista Market Forecast,” Statista, 2025, <https://es.statista.com/outlook/amo/online-gambling/online-casinos/southeast-asia#revenue>.

<sup>47</sup> Teng Yalirozy, “Interior Ministry Orders Gambling Promotion Cessation: The Public Wants Real Action,” Cambodianess, 2024, <https://cambodianess.com/article/interior-ministry-orders-gambling-promotion-cessation-the-public-wants-real-action>.

<sup>48</sup> Ibid.

metode canggih hingga sulit terdeteksi, ketergantungan ekonomi, hingga perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

Kegagalan penanganan isu judi *online* dalam studi kasus ini juga dapat timbul sebagai akibat dari kurangnya peran institusi regional seperti ASEAN dalam membuat kerangka kerja yang mengikat secara global. Telah diketahui bahwa pihak Kamboja dan Indonesia telah menetapkan landasan kerja penanganan kejahatan transnasional pada 17th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) 2023 bersama dengan negara anggota ASEAN lainnya. Kamboja bersama dengan negara-negara anggota lainnya juga telah menandatangani dokumen seperti *Declaration to Prevent and Combat Cybercrime* yang menandakan kesadaran negara-negara akan pentingnya tindak lanjut atas kejahatan lintas batas ini. Pihak Kamboja sendiri mengharapkan kerja sama yang lebih banyak antar sesama negara anggota ASEAN dengan berbagi pengalaman serta data mengenai aktivitas ilegal ini.<sup>49</sup> Meskipun dokumen, kesepakatan, dan dasar kerja telah ditandatangani, hal tersebut tidak akan efektif tanpa adanya langkah konkret dan segera untuk menangani masalah ini secara bersama-sama. Secara garis besar, dengan adanya peningkatan judi *online* di Kamboja, pengaruh negatif tentu menyebar ke kawasan Asia Tenggara secara meluas. Dalam hal ini, ASEAN belum mampu menciptakan regulasi yang kuat dan mengikat bagi semua negara anggota.

Berdasarkan teori institusionalisme dari Ikenberry, ASEAN sebagai institusi regional seharusnya mampu untuk menekan beban biaya guna menangani masalah judi *online* yang dialami oleh negara anggotanya secara efektif. Namun, nyatanya belum ada tindakan pengurangan biaya untuk penegakan hukum oleh ASEAN, dibuktikan dengan ketiadaan mekanisme koordinasi serta dukungan lintas negara yang kuat oleh ASEAN sehingga Kamboja menangani masalah tersebut melalui regulasi nasional yang masih relatif longgar. Selain itu, ASEAN sebagai institusi regional seharusnya dapat lebih menekankan pendekatan kolektif serta menuntut adanya transparansi kepada semua negara anggota akan penanganan kejahatan lintas batas ini. Akan tetapi, kurangnya transparansi oleh Kamboja terkait industri judi *online* membuktikan kegagalan ASEAN sebagai institusi regional dalam mendorong keterbukaan negara anggotanya. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya kerja sama yang optimal antara Kamboja dan Indonesia untuk menangani kejahatan lintas negara secara efektif.

### c. **Perspektif Indonesia**

Pada sisi lain, jika dilihat dari perspektif Indonesia, pada tahun 2020-2023, jumlah WNI yang terkait dengan penipuan dan perjudian online di Kamboja melonjak dari 15 menjadi 1.386 kasus, di mana industri perjudian online di Kamboja berhasil menarik tenaga kerja ilegal dari Indonesia, dengan sekitar 60% pekerja Indonesia di Kamboja terlibat dalam industri perjudian *online*, serta sejumlah besar pekerja Indonesia bermigrasi ke Kamboja untuk bekerja di sektor tersebut.<sup>50</sup> Orang Indonesia yang terlibat dalam industri judi *online* diawali dari pandemi COVID-19, ketika banyak orang yang putus asa mencari pekerjaan dan rentan terhadap penipuan. Frustrasi mereka dalam mencari pekerjaan dimanfaatkan oleh perekrut, di mana para perekrut menjanjikan kesempatan kerja di luar negeri yang

---

<sup>49</sup> Rifki Dermawan, "Indonesia-Cambodia Partnership to Counter Online Gambling," *Modern Diplomacy*, August 12, 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling/>.

<sup>50</sup> Rifki Dermawan, "Indonesia-Cambodia Partnership to Counter Online Gambling," *Modern Diplomacy*, August 12, 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling/>.

minim atau hampir tidak ada persyaratan.<sup>51</sup> Jumlah pekerja ilegal asal Indonesia di Kamboja masih terus meningkat meskipun terdapat pendekatan aktif dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk berkomunikasi dengan Kamboja dan kedua pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama untuk memerangi permasalahan terkait perjudian online, serta KBRI Phnom Penh telah memulangkan ratusan pekerja di Kamboja sejak tahun 2022.<sup>52</sup>

Pemerintah Indonesia juga telah memblokir akses internet di Kamboja dan Filipina sebagai bagian dari komitmennya untuk memberantas perjudian *online*. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya tersebut telah menurunkan akses masyarakat terhadap perjudian online sebesar 50 persen dan mengurangi simpanan masyarakat di situs perjudian online sebesar total Rp34.49 triliun.<sup>53</sup> Masyarakat Indonesia juga dirugikan akibat karena dapat terjebak untuk bekerja dalam industri perjudian *online*, dan menghadapi risiko eksploitasi dan perdagangan manusia.<sup>54</sup> Krisis judi *online* di Indonesia juga memperburuk dengan estimasi sebesar 4 juta penjudi *online* sehingga memiliki implikasi finansial negatif karena transaksi terkait judi *online* dalam sembilan bulan pertama tahun 2024 mencapai Rp280 triliun.<sup>55</sup> Akibat implikasi finansial tidak hanya mempengaruhi penjudi, tetapi juga ekonomi Indonesia karena sebagian besar dana mengalir ke luar negeri sehingga mempengaruhi permasalahan sosial seperti memperburuk kesenjangan masyarakat yang berpenghasilan rendah.<sup>56</sup>

Terdapat peran ASEAN sebagai institusi regional untuk menanggulangi masalah judi *online* dengan kerja sama secara efisien dan hemat biaya, serta membuka transparansi antara Indonesia dan ASEAN untuk menetapkan sebuah landasan kerja sama dalam penanganan kejahatan transnasional. Pada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 pada tahun 2023, Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa anggota ASEAN, termasuk Kamboja. MoU tersebut menunjukkan bahwa kedua negara pada prinsipnya sepakat bahwa ancaman tindak pidana harus ditangani secara kolektif.<sup>57</sup> Selain menandatangani MoU, ASEAN juga telah menyusun *Computer Emergency Response Team* (CERT) untuk memudahkan negara ASEAN dalam berbagi informasi dan menetralkan ancaman digital yang berhubungan dengan pencucian uang.<sup>58</sup>

---

<sup>51</sup> Izzah Aqilah Norman, “‘Armed Men and Sniffer Dogs’: Indonesian Forced to Work in Cambodian Online Gambling Ring Recalls Horror Ordeal,” ed. Denny Armandhanu, CNA, 2025, <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-cambodia-human-trafficking-online-crimes-syndicates-gambling-4849926>.

<sup>52</sup> Rifki Dermawan, “Indonesia-Cambodia Partnership to Counter Online Gambling,” *Modern Diplomacy*, August 12, 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling/>.

<sup>53</sup> Viviana Chan, “Indonesia to Extend Block on Online Gambling Sites to More Countries | AGB,” *Asia Gaming News | AGB - Asia Gaming Brief*, July 29, 2024, <https://agbbrief.com/news/indonesia/30/07/2024/indonesia-to-extend-block-on-online-gambling-sites-to-more-countries/>.

<sup>54</sup> Rifki Dermawan, “Indonesia-Cambodia Partnership to Counter Online Gambling,” *Modern Diplomacy*, August 12, 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling/>.

<sup>55</sup> <https://news.worldcasinodirectory.com/author/vanjamitic>, “Indonesia Sees Sharp Increase in Nationals Moving to Cambodia for Online Gambling,” *World Casino News*, December 17, 2024, <https://news.worldcasinodirectory.com/indonesia-sees-sharp-increase-in-nationals-moving-to-cambodia-for-online-gambling-116465>.

<sup>56</sup> REDAKSI, “Asa’s Camouflage via Online Gambling,” *kompas.id* (Harian Kompas, December 14, 2023), <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/14/en-kamufase-asa-via-judi-daring>.

<sup>57</sup> Rifki Dermawan, “Indonesia-Cambodia Partnership to Counter Online Gambling,” *Modern Diplomacy*, August 12, 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling/>.

<sup>58</sup> “ASEAN Strengthens Actions against Illegal Online Gambling in Collaboration with China - Mundo Video Entertainment | Casino News in Latin America and the World,” *Mundo Video Entertainment* (MundoVideo, January 23, 2025), <https://www.mundovideo.com.co/en/asia/asean-strengthens-actions-against-illegal-online-gambling-in-collaboration-with-china/>.

Meskipun ASEAN telah memiliki beberapa upaya, ASEAN masih gagal dalam menghemat biaya kerja sama serta membuka transparansi antara Indonesia dan ASEAN. Gagalnya ASEAN dalam menghemat biaya disebabkan oleh fragmentasi dalam lingkungan regulasi karena masing-masing negara memiliki regulasi tersendiri, mekanisme untuk berbagi informasi dan melakukan investigasi belum maksimal, serta kurangnya integrasi operasional yang menyebabkan negara anggota sering menduplikasi upaya atau bertindak secara terpisah, sehingga secara keseluruhan meningkatkan biaya penegakan regulasi untuk setiap negara dan mengurangi efisiensi operasional.<sup>59</sup> Hal tersebut juga bertambah parah akibat Indonesia dengan ekonomi nasionalis, yang membatasi keterbukaan Indonesia terhadap upaya keseragaman regulasi dan berdampak kepada ruang lingkup ASEAN untuk mengembangkan solusi yang efektif.<sup>60</sup> ASEAN juga gagal dalam membuka transparansi antara Indonesia dan ASEAN akibat prinsip *non-intervention* ASEAN yang menghambat *decision-making*, serta tidak dapat menyelesaikan masalah transnasional seperti dalam konteks judi *online*.<sup>61</sup>

Indonesia terpengaruhi industri judi *online* dari Kamboja ditunjukkan melalui peningkatan jumlah WNI terkait dengan penipuan dan perjudian online di Kamboja, meskipun terdapat undang-undang yang melarang judi *online*, serta memblokir akses internet Kamboja untuk mengurangi akses terhadap situs judi *online*. Dampak negatif yang dirasakan oleh Indonesia akibat dari industri judi *online* berupa risiko eksploitasi dan perdagangan manusia masyarakat Indonesia, serta kerugian finansial bagi Indonesia. Meskipun ASEAN telah mewadahi dan menciptakan MoU pada AMMTC ke-17, mengeluarkan ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime, serta menyusun CERT, namun prinsip *non-intervention* yang dimiliki ASEAN menyebabkan fragmentasi di mana negara anggota bertindak terpisah, sehingga upaya kolektif menjadi sulit serta biaya operasional semakin meningkat untuk setiap negara. Selain itu, prinsip ini mempersulit upaya ASEAN untuk campur tangan secara langsung dalam mengatasi masalah kejahatan transnasional yang terkait dengan perjudian *online* antara Indonesia dan Kamboja.

## Kesimpulan

ASEAN belum mampu menciptakan regulasi serta gagal sebagai wadah untuk pelaksanaan mekanisme kerja sama regional dalam menyelesaikan permasalahan judi *online* sebagai kejahatan transnasional yang terus berlangsung. Melalui pertanyaan penelitian “Bagaimana judi online yang merupakan kejahatan transnasional dapat terus berlangsung meskipun terdapat institusi seperti ASEAN sebagai wadah untuk pelaksanaan mekanisme kerja sama regional?”, kegagalan ASEAN sebagai wadah untuk melaksanakan mekanisme kerja sama regional dari sudut pandang teori liberal institusionalisme disebabkan oleh ketidakmampuan ASEAN sebagai institusi regional dalam mengurangi biaya transaksi serta membuka transparansi antara Kamboja dan Indonesia dengan ASEAN, serta konsep mekanisme *binding (lock-in)*.

ASEAN sebagai wadah telah memberikan gambaran luas mengenai dasar-dasar kejahatan siber namun belum memiliki kerangka kerja spesifik serta norma kolektif dalam penanganan kejahatan lintas

---

<sup>59</sup> Nelson Moura, “Southeast Asia Faces Escalating Threat from Illegal Online Gambling and Cyber Fraud | AGB,” Asia Gaming News | AGB - Asia Gaming Brief, October 8, 2024, <https://agbrief.com/intel/deep-dive/08/10/2024/southeast-asia-faces-escalating-threat-from-illegal-online-gambling-and-cyber-fraud-un/>.

<sup>60</sup> Joshua Kurlantzick, “The Failures of the ASEAN Economic Community,” Council on Foreign Relations, September 12, 2014, <https://www.cfr.org/blog/failures-asean-economic-community>.

<sup>61</sup> Pushpanathan Sundram, “ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crime: Progress, Perils, and Prospects,” *Frontiers in Political Science* 6 (February 15, 2024), <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>.

batas. Selain itu, Kamboja yang memiliki industri judi *online* dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan sosial Indonesia. Meskipun Kamboja memiliki undang-undang yang melarang judi *online*, undang-undang tersebut tidak selalu ditegakkan karena pemerintah Kamboja dapat melihat potensi keuntungan ekonomi dalam perjudian *online*. Berikutnya, Indonesia terpengaruhi industri judi *online* dari Kamboja, di mana meskipun terdapat undang-undang yang melarang judi *online*, masyarakat Indonesia masih dapat mengakses situs judi *online* dan terkena dampak negatif berupa risiko eksploitasi dan perdagangan manusia masyarakat Indonesia, serta kerugian finansial bagi Indonesia. Terakhir, hal-hal tersebut menunjukkan kegagalan ASEAN sebagai wadah untuk mengurangi biaya transaksi kerja sama, serta menciptakan transparansi dalam upaya penyelesaian isu judi *online* antar Kamboja dan Indonesia yang berdampak besar terhadap Kamboja-Indonesia dan stabilitas domestik masing-masing negara.

## Referensi

- Abdurrohim, M. (2022). ASEAN Digital Masterplan: Responding Cyber Security Dilemma in The Post-Covid Era. *Global Focus*, 2(1), 17–26. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2022.002.01.2>
- Aqilah Norman, I. (2025). “*Armed men and sniffer dogs*”: Indonesian forced to work in Cambodian online gambling ring recalls horror ordeal. CNA. <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-cambodia-human-trafficking-online-crimes-syndicates-gambling-4849926>
- ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime. (2025). Asean.org. <https://asean.org/asean-declaration-to-prevent-and-combat-cybercrime>
- ASEAN-China Joint Statement on Combating Telecommunication Network Fraud and Online Gambling. (2025). Asean.org. <https://asean.org/asean-china-joint-statement-on-combating-telecommunication-network-fraud-and-online-gambling/>
- ASEAN Strengthens Actions Against Illegal Online Gambling in Collaboration with China - Mundo Video Entertainment | Casino News in Latin America and the World. (2025, January 23). Mundo Video Entertainment; MundoVideo. <https://www.mundovideo.com.co/en/asia/asean-strengthens-actions-against-illegal-online-gambling-in-collaboration-with-china/>
- AsiaGamingBrief. (2024, July 7). Cambodia grapples with illegal online gambling boom | AGB. Asia Gaming News | AGB - Asia Gaming Brief. <https://agbrief.com/news/cambodia/08/07/2024/cambodia-grapples-with-illegal-online-gambling-boom/>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Apjii.or.id. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Benincasa, E. (2020). *The role of regional organizations in building cyber resilience: ASEAN and the EU*. [https://pacforum.org/wp-content/uploads/2020/06/issuesinsights\\_Vol20WP3-1.pdf](https://pacforum.org/wp-content/uploads/2020/06/issuesinsights_Vol20WP3-1.pdf)
- Chan, V. (2024, July 29). Indonesia to extend block on online gambling sites to more countries | AGB. Asia Gaming News | AGB - Asia Gaming Brief. <https://agbrief.com/news/indonesia/30/07/2024/indonesia-to-extend-block-on-online-gambling-sites-to-more-countries>
- Chang, L. Y. C. (2017). Cybercrime and Cyber Security in ASEAN. *Comparative Criminology in*

- Asia, 135–148. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-54942-2\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-54942-2_10)
- De Leon, A. (2024). *Cutting Losses: Southeast Asia's Crackdown on Online Gambling | New Perspectives on Asia | CSIS*. Csis.org. <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/cutting-losses-southeast-asias-crackdown-online-gambling>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage.
- Derevensky, J. L., Gupta, R., & Magoon, M. (2004). Adolescent Problem Gambling: Legislative and Policy Decisions. *Gaming Law Review*, 8(2), 107–117. <https://doi.org/10.1089/109218804774076385>
- Dio Suhenda. (2024). *Yearend: Indonesia raises stakes in war against online gambling*. Asianews.network. <https://asianews.network/yearend-indonesia-raises-stakes-in-war-against-online-gambling>
- Editor. (2024, September 4). *The risks of cybercrime for the online gambling industry*. Casino inside - the Gambling Industry Magazine! <https://www.casinoinside.ro/en/the-risks-of-cybercrime-for-the-online-gambling-industry/>
- EG Tan, E., & Ang, B. (2022). ASEAN Ambiguity on International Law and Norms for Cyberspace. *Baltic Yearbook of International Law Online*, 20(1), 133–162. [https://doi.org/10.1163/22115897\\_02001\\_008](https://doi.org/10.1163/22115897_02001_008)
- Estiyovionita, K., & Sitamala, A. (2022). ASEAN's ROLE IN CYBERSECURITY MAINTENANCE AND SECURITY STRATEGY THROUGH AN INTERNATIONAL SECURITY APPROACH. *Lampung Journal of International Law*, 4(2), 81–90. <https://doi.org/10.25041/lajil.v4i2.2556>
- Fahrudin, A., Satispi, E., Subardhini, M., Rinda Andayani, R. H., Jayaputra, A., Yuniarti, L., Wijayanti, F., & Suryani, S. (2024). Online gambling addiction: Problems and solutions for policymakers and stakeholders in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), 9077. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.9077>
- Fidelie, L. W. (2009). Internet Gambling: Innocent Activity or Cybercrime? *International Journal of Cyber Criminology*, 3(1), 476.
- G John Ikenberry. (2019). *After Victory Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars, New Edition*. Princeton University Press.
- Horng, P. (2024, October 14). *The Fall-Outs of Online Gambling in Cambodia - Khmer Times*. Khmer Times - Insight into Cambodia. <https://www.khmertimeskh.com/501573780/the-fall-outs-of-online-gambling-in-cambodia/>
- <https://news.worldcasinodirectory.com/author/vanjamitic>. (2024, December 17). *Indonesia Sees Sharp Increase in Nationals Moving to Cambodia for Online Gambling*. World Casino News. <https://news.worldcasinodirectory.com/indonesia-sees-sharp-increase-in-nationals-moving-to-cambodia-for-online-gambling-116465>
- Keohane, R. O., & S. Nye, J. (1977). *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. (p. 228).
- Kurlantzick, J. (2014, September 12). *The Failures of the ASEAN Economic Community*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/blog/failures-asean-economic-community>
- Luo, J. J. (2023). The Grey Zone of Chinese Capital: Online Gambling in Cambodia's Sihanoukville. *Contemporary Southeast Asia*, 45(3), 414–441. <https://www.jstor.org/stable/27278481>
- Ministry of Tourism, Cambodia - Official Website - Holidays. (n.d.). [Tourismcambodia.org](http://Tourismcambodia.org)

- <https://tourismcambodia.org/official-activities/foreign-tourist-arrivals-increase-140-percent-in-2023>
- Moura, N. (2024, October 8). *Southeast Asia faces escalating threat from illegal online gambling and cyber fraud* | AGB. Asia Gaming News | AGB - Asia Gaming Brief. <https://agbrief.com/intel/deep-dive/08/10/2024/southeast-asia-faces-escalating-threat-from-illegal-online-gambling-and-cyber-fraud-un/>
- Murray, P. (2010). Comparative regional integration in the EU and East Asia: Moving beyond integration snobbery. *International Politics*, 47(3-4), 308–323. <https://doi.org/10.1057/ip.2010.13>
- Novitasari, I. (2018). BABAK BARU REJIM KEAMANAN SIBER DI ASIA TENGGARA MENYONGSONG ASEAN CONNECTIVITY 2025. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(2), 220. <https://doi.org/10.33541/japs.v1i2.624>
- Online Casinos - Southeast Asia* | Statista Market Forecast. (2025). Statista. <https://es.statista.com/outlook/amo/online-gambling/online-casinos/southeast-asia#revenue>.
- Online Gambling - Southeast Asia* | Statista Market Forecast. (2025). Statista. <https://www.statista.com/outlook/amo/online-gambling/southeast-asia>
- Online Gambling Crisis in Indonesia: Understanding Causes and Implementing Solutions*. (2024). Jalin.co.id. <https://www.jalin.co.id/en-id/news/blog/online-gambling-crisis-in-indonesia-understanding-causes-and-implementing-solutions>
- Online Gambling Definition*. (n.d.). Law Insider. <https://www.lawinsider.com/dictionary/online-gambling>
- Online Gambling in a Global Context - Comparing Regulations*. (n.d.). Communityservicelearning. <https://www.communityservicelearning.ca/comparing-regulations-in-online-gambling/>
- Pati, I. (2024). *Stop Online Gambling - News*. Bps.go.id; BPS-Statistics Indonesia Pati Regency. <https://patikab.bps.go.id/en/news/2024/10/18/841/stop-online-gambling.html>
- pebri. (2023, October 20). *Kominfo: Servers of online gambling in Indonesia based in the Philippines and Cambodia - OBSERVER - the latest information about Indonesian news and social culture*. OBSERVER - the Latest Information about Indonesian News and Social Culture. <https://observerid.com/kominfo-servers-of-online-gambling-in-indonesia-based-in-the-philippines-and-cambodia>
- Ramadhan, I. (2022). ASEAN Consensus and Forming Cybersecurity Regulation in Southeast Asia. *Proceedings of the 1st International Conference on Contemporary Risk Studies, ICONIC-RS 2022, 31 March-1 April 2022, South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.31-3-2022.2320684>
- REDAKSI. (2023, December 14). *Asa's Camouflage via Online Gambling*. Kompas.id; Harian Kompas. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/14/en-kamuflase-asa-via-judi-daring>
- Rifki Dermawan. (2024, August 12). *Indonesia-Cambodia Partnership to Counter Online Gambling*. Modern Diplomacy. <https://moderndiplomacy.eu/2024/08/12/indonesia-cambodia-partnership-to-counter-online-gambling>
- Sari, M. N. (2024). Cybercrime in Association of Southeast Asian Nations: Regional Effort and Its Effectiveness. *Journal of Information Policy*, 14. <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.14.2024.0016>
- Sikol, K. (2024). *Cambodia's Illegal Online Gambling Sector Employs Thousands of Indonesians*.



- Kiripost.com. <https://kiripost.com/stories/cambodias-illegal-online-gambling-sector-employs-thousands-of-indonesians>.
- Smith, R. B. (2020). Cybercrime in ASEAN: Anti-Child Pornography Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 277–294. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i2.37931>
- Sundram, P. (2024). ASEAN cooperation to combat transnational crime: progress, perils, and prospects. *Frontiers in Political Science*, 6. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- The Murky Illusion: Online Gambling and Cyber-Security Issues*. (n.d.). [www.cyberpeace.org](http://www.cyberpeace.org). <https://www.cyberpeace.org/resources/blogs/the-murky-illusion-online-gambling-and-cyber-security-issues>
- Tips on How to Protect Yourself against Cybercrime*. (2019, December 5). [www.kaspersky.com](http://www.kaspersky.com). <https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/what-is-cybercrime>
- Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. (2024). [Asean.org](http://asean.org). <https://asean.org/asean-declaration-to-prevent-and-combat-cybercrime/>
- Yalirozy, T. (2025). *Interior Ministry Orders Gambling Promotion Cessation: The Public Wants Real Action*. *Cambodianess*. <https://cambodianess.com/article/interior-ministry-orders-gambling-promotion-cessation-the-public-wants-real-action>.